

# Beberapa Analisis Penerimaan Luar Negeri Indonesia

Oleh : Edy Suandi Hamid



*Edy Suandi Hamid, adalah dosen negeri yang dipekerjakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, disamping juga sebagai staf peneliti pada Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM dan Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia DIY. Lahir di Tanjung Enim 11 Desember 1957, dan menyelesaikan studi dari FE UGM jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan (Umum), april 1983 S1 serta S2 dari Faculty of Economic Thammasat University, Bangkok 1990.*

*Pernah menjadi wartawan dan redaksi ekonomi harian Kedaulatan Rakyat, serta Pimpinan Redaksi Majalah Equilibrium (FE UGM). Kini aktif dalam kegiatan penelitian yang menyangkut masalah pedesaan. Menulis buku Pengantar Teori Perilaku Konsumen (bersama Drs. Effendy Ari, 1985), menyunting buku Kredit Pedesaan di Indonesia (bersama Prof. Mubyarto, 1986) dan Meningkatkan Efisiensi Nasional (bersama Prof. Mubyarto, 1987).*

## Pendahuluan

Salah satu aspek yang menarik untuk bahan kajian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1992/1993 adalah aspek bantuan atau hutang luar negeri. Dalam pos penerimaan pembangunan, tahun ini mengalami penurunan baik secara absolut maupun secara relatif dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp 10,375 triliun (1991/1992) menjadi Rp 9,6 triliun (1992/1993) atau turun sebesar 7,4 %. Penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya, bahkan pada tahun anggaran 1991/1992 penurunan mencapai 8,1 %. Apakah penurunan ini akan menjadi kecenderungan pada tahun-tahun mendatang, ataukah hanya bersifat

sementara, merupakan salah satu pertanyaan yang menarik untuk dianalisis. Namun demikian yang pasti adalah bahwa porsi penerimaan pembangunan (hutang luar negeri) terhadap total belanja atau anggaran pembangunan dalam tahun 1992/1993, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 1991/1992, sudah semakin kecil.

Sebelum mengkaji secara spesifik masalah bantuan luar negeri atau penerimaan pembangunan dalam APBN 1992/1993 maka ada baiknya untuk melihat dan menganalisis perkembangan pos ini sejak Pelita I, yang dikaitkan dengan beberapa prinsip dalam kebijaksanaan fiskal kita, khususnya yang berkaitan dengan APBN ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### Anggaran Belanja Seimbang Semu.

Dalam GBHN secara sngat jelas disuratkan bahwa bantuan luar negeri sifatnya hanya merupakan pelengkap dalam membiayai pembangunan nasional. Artinya, dana utama untuk belanja pembangunan tersebut harus lebih diutamakan bersumber pada potensi masyarakat Indonesia. Sumber dalam negeri ini jika dilihat dari anggaran pembangunan pemerintah dapat dilihat dari pos tabungan pemerintah, yakni selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pada RAPBN yang setiap tahunnya dijalankan mulai 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya.

Namun demikian dalam perjalanan sejarah pembangunan kita yang tertuang dalam RAPBN tersebut, dapat diketahui sejak Pelita I sampai sekarang, andil bantuan luar negeri terhadap anggaran pembangunan sangat berarti. Data yang ada menunjukkan, porsi bantuan luar negeri (dilihat dari nilai rupiahnya) berkisar antara 24 hingga 81 persen dari total anggaran pembangunan. Bilangan tertinggi terjadi pada tahun terakhir Pelita IV (1988/89) dengan 81,5% serta awal Pelita I (1969/1970), yang mencapai 77%. Artinya, sebanyak 81,5% dan 77% dari program pembangunan pemerintah pada tahun-tahun tersebut dibiayai oleh hutang luar negeri, dan hanya 18,5 dan 23% yang berasal dari tabungan pemerintah. Oleh karena itu sering dikemukakan bahwa anggaran belanja negara kita yang selalu berimbang ini sebagai anggaran belanja seimbang yang semu (artificial balance budget). Tanpa adanya pinjaman luar negeri tersebut, maka anggaran belanja negara selalu berada dalam keadaan defisit.

Dalam teori Ekonomi Makro dikatakan

suatu anggaran belanja adalah seimbang apabila sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran. Namun demikian, dalam sisi penerimaan ini tidak dimasukkan adanya unsur hutang. Oleh karena itu, angka pengganda (multiplier) dari suatu anggaran berimbang adalah satu. Sebagai konsekuensinya, anggaran berimbang secara teoritik tidak akan melahirkan suatu efek kontraksi ataupun ekspansi, karena kedua efek ini akan meniadakan satu dengan lainnya atau sama besarnya. Jika dikaitkan dengan APBN kita, maka APBN tersebut dapat dikatakan berimbang (menurut pengertian teoritik) apabila pos penerimaan dalam negeri sama dengan pengeluaran rutin ditambah pengeluaran pembangunan. Hal ini tidak terjadi dalam APBN kita, karena dimasukkannya unsur hutang luar negeri sebagai pos yang menghasilkan keseimbangan budget, sehingga dikatakan sebagai anggaran belanja berimbang semu tersebut.

### Kaitan Bantuan Luar Negeri dan Penerimaan Minyak.

Jika diamati, maka pola bantuan luar negeri ini erat sekali kaitannya dengan perkembangan harga dan penerimaan minyak kita. Pada tahun-tahun di mana harga minyak meningkat, maka bantuan luar negeri secara proporsional terhadap anggaran pembangunan mengalami penurunan. Ini dapat dilihat misalnya tahun 1973/1974, di mana terjadi perang Arab-Israel yang membombungkan harga minyak lebih tiga kali lipat dalam waktu setahun. Harga ekspor minyak bumi Indonesia pada bulan April 1973 hanya US\$ 3,73 per barrel, dan ini meningkat menjadi US\$ 11,70 pada bulan yang sama tahun berikutnya. Naiknya harga ekspor minyak ini telah menekan porsi bantuan luar negeri dan mencapai titik terendah

dalam tahun anggaran berikutnya, yakni 23,9% dari anggaran pembangunan pada tahun 1974/75.

Keadaan demikian terulang dalam tahun-tahun awal dekade 1980-an. Dalam kurun waktu 1980-1985 harga ekspor minyak kita berkisar antara US\$ 27,50 hingga US\$ 35 per barrel. Harga tertinggi ini tercatat pada bulan Januari 1981. Sebaliknya, anjloknya harga minyak dunia membuat pinjaman luar negeri ini semakin besar, sebagaimana yang terjadi sejak medio 1980-an di mana harga minyak bertahan pada tingkat yang rendah. Penurunan tajam harga minyak ini terjadi

tahun 1986, yang mencapai titik terendah pada bulan Agustus 1986, yakni US\$ 9,83 per barrel. Sejak itu sampai dengan terjadinya Krisis Teluk pada Agustus 1990 harga ekspor minyak kita tak pernah mencapai angka US\$ 19 per barrel.

Fluktuasi harga minyak dan gas di pasar internasional tersebut secara langsung mempengaruhi penerimaan ekspor Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan nilai ekspor minyak dan gas alam sejak 1969/1970 hingga tahun 1991/1992).

Tabel : 1  
Nilai Ekspor Minyak Bumi dan Gas Alam 1969/70 - 1991/92  
( dalam juta US \$ )

Tahun	Minyak bumi	Gas alam	Jumlah	persentase perubahan
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 ) = ( 2 + 3 )	( 5 )
1969/70	384	-	384	-
1970/71	443	-	443	+ 15,4
1971/72	590	-	590	+ 33,2
1972/73	965	-	965	+ 63,6
1973/74	1.708	-	1.708	+ 77,0
1974/75	5.153	-	5.153	+ 201,7
1975/76	5.273	-	5.273	+ 2,3
1976/77	6.350	-	6.350	+ 20,4
1977/78	7.191	162	7.353	+ 15,8
1978/79	6.858	516	7.374	+ 0,3
1979/80	10.995	1.345	12.340	+ 67,3
1980/81	15.187	2.111	17.298	+ 40,2
1981/82	16.482	2.342	18.824	+ 8,8
1982/83	12.283	2.461	14.744	- 21,7
1983/84	12.050	2.399	14.449	- 2,0
1984/85	10.625	3.369	13.994	- 3,1
1985/86	8.816	3.621	12.437	- 11,1
1986/87	4.798	2.168	6.966	- 44,0
1987/88	6.159	2.682	8.841	+ 26,9
1988/89	5.007	2.633	7.640	- 13,6
1989/90	6.288	3.049	9.337	+ 22,2
1990/91			12.763	+ 36,7
1991/92*			10.997	- 13,84

\* Perkiraan realisasi

Namun demikian ada kecenderungan bahwa ketergantungan pada penerimaan minyak ini semakin dapat ditinggalkan. Timbulnya kesadaran yang tinggi akan bahaya penerimaan yang hanya mengandalkan dari satu sektor saja, telah membuat pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendorong tumbuhnya sektor-sektor di luar minyak dan gas. Hasilnya cukup dirasakan sekarang. Kemerosotan dan gejolak harga minyak dunia, tidak terlalu melabilkan pembangunan, karena sektor-sektor lain cukup mampu mengantisipasi dan mengkompensasi penerimaan minyak yang anjlok tersebut. Jika dilihat dari penerimaan ekspor, misalnya, sekarang ini andil minyak bumi sudah dibawah 50%. Padahal sejak 1974 hingga 1986 yang lalu andil minyak dalam ekspor total selalu melampaui angka 50% (lihat Lampiran 1).

Namun demikian ini tidak berarti bahwa peran hutang luar negeri ini telah semakin kecil. Bantuan luar negeri yang tadinya proporsinya sudah menurun di bawah 50% dari total, pengeluaran pembangunan, sejak 1986/1987 hingga tahun 1991/1992 kembali berada pada tingkat di atas 50 persen. Bila dilihat nilai absolutnya, misalnya tahun 1991/1992

yang lalu juga masih tinggi, yakni mencapai Rp. 10,371 trilyun, yang berarti jauh diatas jumlah pengeluaran pemerintah untuk membayar seluruh gaji pegawainya yang ada di dalam dan luar negeri serta tunjangan-tunjangan pegawai lainnya yang tahun itu dialokasikan sebesar Rp. 7,753 trilyun.

Perkembangan nilai absolut hutang luar negeri ini sejak Pelita I (dalam nilai rupiah) hingga tahun 1990/1991 cenderung semakin meningkat. Tahun 1969/70 pinjaman luar negeri tersebut hanya Rp. 91 milyar, dan tahun 1990/1991 sudah membengkak menjadi Rp. 11.289,5 trilyun. Sementara itu, secara proporsional atas total anggaran pembangunan, kecuali dalam dua tahun terakhir ini, peran bantuan luar negeri seakan tidak menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun (berkisar 70-81,5% sejak 1986/87). Sampai tahun anggaran 1990/1991 porsi bantuan luar negeri atas pengeluaran pembangunan ini masih sekitar 70%.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan nilai belanja pembangunan pemerintah, serta sumber pembiayaannya sejak Pelita I, dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel : 2  
Pengeluaran Pembangunan 1969/1970-1991/1993

Th. Anggaran	Anggaran Pembangunan (milyar rupiah)	Dibiayai oleh	
		Tabungan Pemerintah ( % )	Bantuan Luar negeri ( % )
PELITA I :			
1969/1970	118,2	23,0	77,0
1970/1971	118,2	31,9	68,1

PELITA II :			
1971/1972	214,4	310,3	458,3
1972/1973			
1973/1974			
PELITA III :			
1974/1975	969,6	1.400,9	76,1
1975/1976			
1976/1977	2.060,0	62,0	59,5
1977/1978	2.159,9	64,2	35,8
1978/1979	2.557,9		40,5
PELITA IV :			
1979/1980	4.016,1	65,6	34,4
1980/1981	5.920,8	74,8	25,2
1981/1982	6.944,0	73,4	24,6
1982/1983	7.362,0	73,6	26,4
1983/1984	9.903,3	60,8	39,2
PELITA V :			
1984/1985	9.954,3	63,1	34,9
1985/1986	10.873,9	67,1	32,9
1986/1987	8.333,9	30,97	69,03
1987/1988	9.479,8	33,04	64,96
1988/1989	12.256,0	18,5	81,5
1989/1990	13.838,0	31,86	68,14
1990/1991	16.223,0	30,42	69,58
1991/1992	19.997,7	48,14	51,86
1992/1993	22.912,0	58,08	41,92

Sumber : Diolah dari RAPBN 1992 / 1993

Peran bantuan luar negeri dalam Pelita IV yang mencapai 56,8% dari seluruh dana pembangunan, menunjukkan peningkatan yang berarti dibandingkan dengan Pelita-Pelita sebelumnya, yakni Pelita I (55,4%, Pelita II (36,2%) dan Pelita III (30,5%)). Hal ini menunjukkan bahwa derajat ketergantungan kita selama paling tidak sampai tahun kedua Pelita V tidak mengalami penurunan, atau bahkan

meningkat jika dibandingkan dengan periode Pelita II dan Pelita III. Walaupun sering bergema pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan menurunkan derajat ketergantungan ini, namun angka-angka kuantitatif tersebut menunjukkan bahwa keinginan tersebut hingga tahun 1990/1991 belum mewujudkan.

### Hutang Luar Negeri dalam Tahun Anggaran 1992/1993

Bagaimanakah porsi penerimaan dari hutang luar negeri dalam tahun anggaran 1992/1993 ini? Seperti dikemukakan sebelumnya, hutang luar negeri dalam RAPBN 1992/1993 mengalami penurunan sebesar 7,4%, yakni dari Rp. 10,371 trilyun menjadi "hanya" Rp 9,6 trilyun. Ada beberapa aspek yang kiranya menarik untuk didiskusikan dari angka-angka hutang luar negeri ini. Dilihat dari nilai nominalnya (maupun riil), maka penurunan hutang luar negeri ini bisa mencerminkan bahwa kita semakin berusaha mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri untuk mengisi "defisit" pada anggaran belanja pemerintah.

Namun penurunan ini juga bisa terjadi karena kekhawatiran kita bahwa hutang yang bisa diperoleh dari luar akan semakin sulit. Adanya signal yang berkali-kali diberikan negara-negara donor sebelumnya, yang akan menurunkan pinjaman lunak untuk Indonesia, telah memaksa untuk tidak terlalu mematok angka terlalu tinggi dalam pos pinjaman luar negeri tersebut. Faktor lainnya adalah karena kesulitan kita dalam menyediakan dana rupiah (counterpart fund) sebagai syarat untuk merealisasikan hutang luar negeri ini. Hutang luar negeri yang dianggarkan dalam tahun 1992/1993,

dilihat dari nilai rupiahnya, adalah sedikit lebih besar dibandingkan hutang yang dibuat pemerintah pada tahun anggaran 1988/1989, yakni sebesar Rp 9,9 trilyun.

Sebagaimana diketahui, pinjaman luar negeri ini aslinya diterima dalam bentuk atau diukur dengan mata uang asing keras (hard currencies). Jika kita kurs-kan hutang luar negeri ini, misalnya secara sederhana dengan hanya menggunakan mata uang dollar AS sebagai ukuran, maka nilainya pun semakin menurun. Dalam bentuk dollar (dengan kurs tengah Januari 1991 US\$ 1 = Rp 1912), hutang luar negeri yang dianggarkan dalam tahun 1991/1992 adalah US\$ 5,4244 milyar. Sedangkan untuk tahun anggaran 1992/1993 yang disampaikan Kepala Negara (dengan kurs US\$ 1 = Rp 1996) hutang luar negeri tersebut adalah US\$ 4,8 milyar. Jadi, setelah memperhitungkan perubahan nilai kurs, penurunan yang terjadi bukanlah 7,4% melainkan sebesar 11,1 persen.

Dengan melihat nilai-nilai uangnya, baik dalam rupiah maupun dollar, jika dikaitkan dengan prinsip kemandirian kita, maka keadaan yang digambarkan dalam APBN 1992/1993 ini bisa dinilai positif, karena sejalan dengan tekad untuk menjadikan bantuan luar negeri hanya sebagai *pelengkap*, sebagaimana diamanatkan dalam GBHN. Artinya, dana utama untuk belanja pembangunan harus lebih diutamakan yang sumbernya pada potensi masyarakat Indonesia sendiri. Sumber dalam negeri ini, jika dilihat dari anggaran pembangunan, tercermin dalam nilai *tabungan pemerintah*, yakni selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin.

Namun demikian kajian terhadap hutang luar negeri ini, bisa pula -- dan

biasanya dianggap lebih penting -- adalah dilihat dari sejauhmana peran (persentase) bantuan luar negeri tersebut dalam pengeluaran pembangunan. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam penerapan anggaran belanja kita, yakni *prinsip anggaran dinamis*, di samping prinsip berimbang dan fungsional. Dalam prinsip anggaran yang dinamis ini dikemukakan bahwa peran (porsi) bantuan luar negeri terhadap anggaran pembangunan harus semakin menurun. Atau, dengan kata lain, porsi *tabungan pemerintah* haruslah semakin besar. Semakin besar porsi tabungan pemerintah dalam belanja pembangunan, berarti semakin mandiri pula pembangunan kita, khususnya yang dilakukan pemerintah, begitu pula sebaliknya.

Jika melihat hutang luar negeri dalam RAPBN 1992/1993 dibandingkan tahun anggaran sebelumnya maka tampak jelas bahwa porsinya terhadap anggaran pembangunan semakin kecil (lihat Tabel). Dengan kata lain, sebagian besar proyek-proyek investasi pemerintah kian sedikit yang mengandalkan dari dana hutang luar negeri ini. Sementara itu, pengeluaran pembangunan yang dibiayai oleh dana tabungan pemerintah, yang mencerminkan kekuatan dana domestik dalam membangun, semakin meningkat. Porsi hutang luar yang sebesar 41,92 persen dari anggaran pembangunan ini, masih lebih besar dibandingkan porsi rata-rata tahunan pada periode Pelita II dan Pelita III, yang masing-masing adalah 36,2% dan 30,5 persen.

Konsekuensi ekonomis yang dirasakan dengan menurunnya hutang luar negeri ini adalah cenderung memperlambat ekspansi pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran

1992/1993 ini. Keadaan seperti ini sebetulnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Alasannya adalah, *pertama*, dalam jangka panjang penurunan hutang ini akan mengurangi beban pembayaran bunga dan cicilan hutang tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang pos pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sudah sangat menggerogoti dana pengeluaran rutin. Nilai pos ini bahkan sudah jauh melebihi dari nilai hutang baru yang dibuat! Dengan kata lain sudah terjadi *capital outflow* atau *negative capital inflow of funds* sebagai konsekuensi sudah terlalu besarnya hutang luar negeri ini. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, anggaran ini sudah pada posisi *gali lubang tutup lubang, dan lubang yang ditutup ternyata kian membesar....*

Alasan kedua, penurunan hutang ini dapat memberikan rangsangan bagi kita untuk mengefisienkan pengeluaran dana yang ada dan berupaya mencari sumber-sumber pendapatan alternatif, seperti menggalakkan ekspor ataupun pariwisata. Dalam rangka efisiensi misalnya dapat dipikirkan bagaimana upaya memperkecil capital output ratio (COR), sehingga setiap rupiah yang diinvestasikan dapat menghasilkan output yang memadai, atau mencari sektor-sektor yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan nilai investasi yang tertentu. Di samping itu, tentu saja kebocoran-kebocoran anggaran belanja ini - yang oleh Prof. Soemitro pernah dikatakan mencapai 30% - bisa ditekan karena adanya tantangan penurunan hutang luar negeri ini.

#### **Pembayaran Bunga dan Cicilan.**

Konsekuensi dari besarnya hutang luar negeri yang telah dibuat, adalah

munculnya kewajiban untuk membayar bunga dan cicilan atas hutang-hutang yang itu. Pembayaran bunga dan cicilan hutang ini dari tahun ke tahun juga terus

mengalami peningkatan, sejalan dengan meningkatnya hutang yang telah diterima (lihat Tabel 3).

Tabel : 3  
Peranan Pembayaran Bunga dan Cicilan Hutang Luar Negeri  
Terhadap Pengeluaran Rutin dan Realisasi APBN,  
1969/70 - 1992/93  
( dalam milyar rupiah )

Tahun Anggaran	Bunga dan cicilan hutang luar negeri	Pengeluaran rutin	%	Rcalisasi A P B N	%
(1)	(2)	(3)	(4)-(2):(3)	(5)	(6)-(2):(5)
<b>REPELITA I</b>					
1969/70	12,7	216,5	5,9	334,7	3,8
1970/71	23,6	288,2	8,2	457,8	5,2
1971/72	41,0	349,1	11,7	545,0	7,5
1972/73	46,0	438,1	10,5	736,3	6,2
1973/74	62,5	713,3	8,8	1.164,2	5,4
<b>REPELITA II</b>					
1974/75	67,3	1.016,1	6,6	1.977,9	3,4
1975/76	71,7	1.332,6	5,4	2.730,3	2,6
1976/77	165,1	1.629,8	10,1	3.684,3	4,5
1977/78	221,0	2.148,9	10,3	4.305,7	5,1
1978/79	525,7	2.743,7	19,2	5.299,3	9,9
<b>REPELITA III</b>					
1979/80	647,6	4.061,8	15,9	8.076,0	8,0
1980/81	754,0	5.800,0	13,0	11.716,1	6,4
1981/82	915,3	6.977,6	13,1	13.917,7	6,6
1982/83	1.204,7	6.996,3	17,2	15.607,3	7,7
1983/84	2.072,8	8.411,8	24,6	18.311,0	11,3
<b>REPELITA IV</b>					
1984/85	2.737,2	9.429,0	29,0	19.380,9	14,1
1985/86	3.303,1	11.951,5	27,6	22.824,6	14,5
1986/87	5.058,1	13.559,3	37,3	21.891,3	23,1
1987/88	8.165,5	17.481,5	46,7	26.958,9	30,3
1988/89	10.862,6	20.739,0	52,4	32.989,7	32,9
<b>REPELITA V</b>					
1989/90	11.789,9	24.331,1	48,5	38.165,4	30,9
1990/91	13.145,1	29.997,7	43,8	49.449,7	26,6
1991/92 <sup>*)</sup>	14.129,5	30.557,8	46,2	50.555,5	27,9
1992/93 <sup>xx)</sup>	15.627,0	33.196,6	47,1	56.188,6	27,9

x) APBN

xx) RAPBN



Dari Tabel ini secara nyata menunjukkan beban pembayaran bunga dan cicilan hutang ini semakin besar menggerogoti pengeluaran rutin pemerintah. Artinya, porsi pos-pos pengeluaran rutin lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom ataupun subsidi lainnya, mungkin terpaksa dikurangi untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang tersebut. Dalam tahun 1992/1993 pos ini dianggarkan sebesar Rp 15,9 triliun atau menyerap 47,9% dari seluruh pengeluaran rutin. Secara nominal pembayaran bunga dan cicilan hutang tersebut meningkat 10,6% dari anggaran tahun lalu. Sedangkan persinya terhadap total pengeluaran rutin juga lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu, yang "hanya" 47,0 persen. Dengan demikian semakin besarnya pembayaran bunga dan cicilan hutang ini memperkuat daya kontraksi yang terjadi pada pos penerimaan. Dengan semakin banyaknya pinjaman dari negara-negara sahabat dan lembaga keuangan internasional itu yang sudah jatuh tempo, maka diperkirakan pada tahun-tahun mendatang akan semakin besar pula dana yang harus dialokasikan pada pos pengeluaran ini.

### **Perkuat Kemandirian**

Apakah dalam waktu-waktu mendatang kemandirian kita dalam membangun ini akan meningkat? Agaknya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dalam perekonomian dunia yang cenderung tidak menentu ini. Namun berbagai statement pemerintah secara tegas sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah bertekad untuk memperkuat kemandirian dalam

membiayai pembangunan nasional. Pernyataan ini agaknya dikaitkan dengan adanya tanda-tanda akan menurunnya bantuan IGGI untuk Indonesia di masa-masa mendatang, disamping juga sebagai ketidakpuasan atas tekanan-tekanan yang diberikan negara donor yang mengaitkan bantuannya dengan Insiden Dili.

Entah karena terpaksa atau sudah menjadi tekad kita, namun sikap untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan tersebut memang sudah sepantasnya dilaksanakan. Amanat rakyat yang tersurat dalam GBHN pun menuntut demikian, menuntut adanya kondisi yang semakin mengandalkan sumber-sumber dana sendiri untuk pembangunan ini. Artinya memobilisasi berbagai potensi yang ada di dalam negeri untuk menggantikan sumber luar tersebut sudah seharusnya digalakkan. Rencana-rencana pembangunan pun dibuat dengan melihat lebih banyak pada kemampuan dana sendiri tersebut.

Oleh karena itu walaupun nanti bantuan-bantuan dari negara donor benar-benar diturunkan, sepantasnya kita tidak perlu mencari dana hutang pada sumber lainnya, yang bahkan lebih berat persyaratannya. Pinjaman dari IGGI adalah pinjaman berbunga murah dan bersyarat lunak. Karena itu pinjaman antar negara atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional nonprofit ini diburu banyak negara Dunia Ketiga. Dan pinjaman inilah yang diisyaratkan akan menurun, baik karena alasan kemampuan yang terbatas dari donor maupun karena pertimbangan bahwa Indonesia sudah semakin maju sehingga bantuan yang diterimanya perlu diturunkan agar negara lain yang lebih miskin bisa lebih banyak mendapat pinjaman mereka.

Keadaan mungkin akan meningkatkan ketergantungan kita kalau pada akhirnya bantuan IGGI yang diisyaratkan menurun ini pada masa yang akan datang digantikan dengan pinjaman-pinjaman dari bank-bank komersial dengan tingkat bunga tinggi. Kemungkinan menurunnya pinjaman lunak dari IGGI ini paling tidak memberikan "signal" kepada kita bahwa pada tahun-tahun berikutnya pinjaman lunak ini semakin sulit. Oleh karena itu, jika sudah bertekad untuk menurunkan kemandirian, maka jalan keluarnya tidaklah mencari sumber alternatif dari luar negeri yang lebih berat beban pembayarannya. Mobilisasi sumber-sumber dalam negeri, serta membuat rencana pembangunan yang realistis dengan sumber-sumber penerimaan yang mungkin didapat dengan tidak harus

menanggung beban bunga tinggi, merupakan hal yang agaknya perlu mendapat perhatian utama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dornsbush, Rudiger dan Fischer, Stanley, *Macro Economics*, McGraw-Hill, Inc., Singapore, 1983.
- Hamid, Edy Suandi, "Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia", makalah pada *Seminar On Economic Current Issues* yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE UII, Yogyakarta, 1991
- , "Analisis RAPBN 1992/1993", *Kedaulatan Rakyat* 14 - 15 Januari 1992, Yogyakarta, 1992.
- Rizal Ramly, "Hutang Luar Negeri Indonesia : Kontraksi dan Beban Ekonomi" dalam *PRISMA* Nomor 9/XX/September 1991, LP3ES, Jakarta, 1991.

## Lampiran 1

Tabel  
 TABUNGAN PEMERINTAH, 1969/70 - 1991/92  
 ( dalam milyar rupiah )

Tahun Anggaran	Jumlah	Kenalkan Penurunan
<b>REPELITA I</b>		
1969/70	27,2	
1970/71	56,4	• 29,2
1971/72	78,9	• 22,5
1972/73	152,5	• 73,6
1973/74	254,4	• 101,9
<b>REPELITA II</b>		
1974/75	737,6	• 483,2
1975/76	909,3	• 171,7
1976/77	1.276,2	• 366,9
1977/78	1.386,5	• 110,3
1978/79	1.522,4	• 135,9
<b>REPELITA III</b>		
1979/80	2.635,0	• 1.112,6
1980/81	4.427,0	• 1.792,0
1981/82	5.235,0	• 808,0
1982/83	5.422,0	• 187,0
1983/84	6.020,9	• 598,9
<b>REPELITA IV</b>		
1984/85	6.476,5	• 455,6
1985/86	7.301,3	• 824,8
1986/87	2.581,3	- 4.720,0
1987/88	3.321,8	• 740,5
1988/89	2.265,3	- 1.056,5
<b>REPELITA V</b>		
1989/90	4.408,7	• 2.143,4
1990/91	9.548,7	• 5.140,0
1991/92 <sup>*)</sup>	9.626,2	• 77,5

\*) APBN

## Lampiran 2

Tabel  
HARGA EKSPOR MINYAK BUMI INDONESIA  
( dalam US \$ per barel )

Tahun		Harga minyak Minas	Tahun		Harga minyak Minas
1969	Januari	1,67	1988	Januari	17,22
1971	April	2,21		Maret	15,45
1972	April	2,96		April	16,04
1973	April	3,73		Juli	15,24
1974	April	11,70		Agustus	14,55
1975	Oktober	12,80		September	13,88
1977	Januari	13,55		Oktober	11,98
1979	Januari	13,90		November	12,35
	April	15,65		Desember	14,58
	Desember	25,50	1989	Januari	17,04
1980	Januari	27,50		Februari	17,50
	Februari	29,50		April	18,21
	Mei	31,50		Mei	18,64
1981	Januari	35,00		Juni	18,07
1982	November	34,53		Juli	17,94
1983	Maret	29,53		September	17,02
1985	Februari	28,53		Oktober	17,36
1986	Januari	25,13		November	17,86
	Februari	21,00		Desember	18,07
	Maret	14,45	1990	Januari	19,24
	April	10,66		Februari	19,32
	Juni	12,11		Maret	18,63
	Juli	10,25		April	17,49
	Agustus	9,83		Mei	16,30
	September	12,20		Juni	15,55
	Desember	13,07		Juli	14,81
1987	Januari	15,39		Agustus	19,19
	Februari	17,58		September	28,03
	Mei	17,62		Oktober	35,29
	Juli	18,83		November	33,57
	Agustus	18,76		Desember	29,01
	September	18,00	1991	Januari	25,48
	Oktober	18,21		Februari	21,79
	November	17,84		Maret	17,72
	Desember	16,93		April	17,37
				Mei	18,01
				Juni	18,30
				Juli	18,56
				Agustus	19,00
				September	19,49
				Oktober	20,45
				November	21,01
				Desember	20,34

## Lampiran 3

Tabel  
NILAI EKSPOR, 1969/70 - 1991/92  
(dalam juta US \$)

Tahun anggaran	Migas	%	Bukan migas	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4)	(7)
1969/70	384	36,8	660	63,2	1.044	100
1970/71	443	36,8	761	63,2	1.204	100
1971/72	590	42,9	784	57,1	1.374	100
1972/73	965	49,8	974	50,2	1.939	100
1973/74	1.708	47,3	1.905	52,7	3.613	100
1974/75	5.153	71,7	2.033	28,3	7.186	100
1975/76	5.273	73,8	1.873	26,2	7.146	100
1976/77	6.350	68,9	2.863	31,1	9.213	100
1977/78	7.353	67,7	3.507	32,3	10.860	100
1978/79	7.374	65,0	3.979	35,0	11.353	100
1979/80	12.340	66,7	6.171	33,3	18.511	100
1980/81	17.298	75,6	5.587	24,4	22.885	100
1981/82	18.824	81,9	4.170	18,1	22.994	100
1982/83	14.744	79,0	3.928	21,0	18.672	100
1983/84	14.449	72,9	5.367	27,1	19.816	100
1984/85	13.994	70,3	5.907	29,7	19.901	100
1985/86	12.437	66,8	6.175	33,2	18.612	100
1986/87	6.966	50,9	6.731	49,1	13.697	100
1987/88	8.841	48,2	9.502	51,8	18.343	100
1988/89	7.640	38,5	12.184	61,5	19.824	100
1989/90	9.337	39,2	14.493	60,8	23.830	100
1990/91	12.763	45,4	15.380	54,6	28.143	100
1991/92 <sup>1)</sup>	10.997	37,6	18.225	62,4	29.222	100

1) Perkiraan realisasi

